

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) PADA  
SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN DI CV. JAYA LANGGENG TRANS  
SIDOARJO**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MUHAMMAD HARIS AZMI NUR ALAM**

**NIM. G92214033**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Haris Azmi Nur Alam  
NIM : G92214033  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi  
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada Sistem Akuntansi Penjualan di CV. Jaya Langgeng Trans Sidoarjo

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Haris Azmi Nur Alam

NIM. G92214033

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haris Azmi Nur Alam NIM. G92214033 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2018  
Pembimbing,



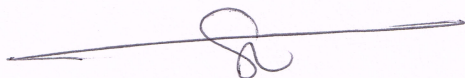
**Siti Rumilah, S.Pd., M.Pd**  
**NIP. 197607122001102005**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haris Azmi Nur Alam NIM. G92214033 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 25 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

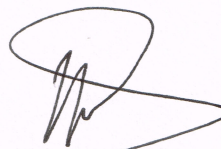
### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



**Siti Rumilah, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 197607122001102005

Penguji II



**Nurlatifah, MM**  
NIP. 196205222000032001

Penguji III



**Lilik Rahmawati, MEI**  
NIP. 198106062009012008

Penguji IV



**Hastanti Agustin R, SE, M.Acc,Ak, CA, BKP**  
NIP. 198110142014031002

Surabaya, 1 Agustus 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



**Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM**  
NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD HARIS AZMI NUR ALAM  
NIM : G92214033  
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI  
E-mail address : harisazmi061195@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) PADA SISTEM

AKUNTANSI PENJUALAN DI CV. JAYA LANGGENG TRANS SIDOARJO

---

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Penulis

(M. HARIS AZMI NUR ALAM)





































































































penjualan dan dari fungsi kredit yang mengecek kemampuan pembeli dalam melunasi kewajibannya, dalam struktur organisasi, fungsi pemberi otorisasi kredit ini berada di tangan bagian kredit yang berada di bawah departemen keuangan. Departemen keuangan adalah pemegang fungsi penyimpanan. Dengan dipisahkannya tiga fungsi pokok tersebut, catatan piutang dapat dijamin ketelitian dan keandalannya serta aset perusahaan dapat dijamin keamanannya.

3) Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas.

Berdasarkan unsur pengendalian internal yang baik, fungsi akuntansi harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan kata lain, suatu sistem yang menggabungkan dengan fungsi operasi dan fungsi penyimpanan akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukannya. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan piutang berada di tangan bagian piutang dan fungsi kas yang bertanggung jawab atas penerimaan kas yang berasal dari pelunasan piutang berada di tangan bagian kasa. Pemisahan kedua fungsi pokok ini akan mencegah terjadi manipulasi catatan piutang yang biasanya dikenal dengan sebutan *lapping*. *Lapping* merupakan bentuk kecurangan penerimaan kas dari piutang yang terjadi jika fungsi pencatatan piutang dan fungsi penerimaan kas dari piutang berada di tangan satu karyawan. Karyawan tersebut

mempunyai kesempatan melakukan kecurangan dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas dari seorang debitur, menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingan pribadinya, dan menutupi kecurangannya dengan cara mencatat ke dalam kartu piutang debitur tersebut dari penerimaan kas dari debitur lain.

- 4) Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi.

Dalam merancang sistem untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, yang harus diperhatikan unsur pokok sistem pengendalian internal bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. Dengan penggunaan unsur pengendalian internal tersebut, setiap pelaksanaan transaksi selalu akan tercipta *internal check* yang mengakibatkan pekerjaan karyawan yang satu dicek ketelitian dan keandalannya oleh satu karyawan yang lain. Oleh karena itu, dalam sistem penjualan kredit harus dirancang unsur pengendalian internal. Jadi, transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi saja.

- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.

Dalam organisasi, setiap transaksi keuangan terjadi melalui system otorisasi tertentu. Tidak ada satu pun transaksi yang terjadi yang tidak diotorisasi oleh petugas yang memiliki wewenang untuk memberikan otorisasi. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan oleh yang memiliki wewenang pada dokumen sumber atau dokumen

pendukung. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan begitu setiap transaksi terjadi dengan otorisasi dari yang berwenang dan dicatat melalui prosedur tertentu, maka asset perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya.

- 1) Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir order pengiriman.

Transaksi penjualan dimulai dengan diterimanya order dari pembeli. Sebagai awal kegiatan penjualan, fungsi penjualan mengisi formulir surat order pengiriman untuk memungkinkan berbagai pihak melaksanakan pemenuhan order yang diterima dari pembeli. Persetujuan dimulainya kegiatan penjualan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari fungsi penjualan pada formulir surat order pengiriman. Dengan demikian fungsi penjualan ini bertanggung jawab atas perintah pengiriman yang ditujukan kepada fungsi pengiriman dalam pemenuhan order yang diterimanya dari pembeli.

- 2) Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada *credit copy*.

Untuk mengurangi resiko tidak tertagihnya piutang, transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit, sebelum barang dikirimkan ke pembeli. Otorisasi ini berupa tanda tangan kepala bagian kredit dalam dokumen *credit copy*, yang merupakan tembusan surat order pengiriman.

- 3) Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “sudah dikirm” pada *copy* surat order pengiriman.

Sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang, fungsi pengiriman membubuhkan tanda tangan otorisasi dan cap sudah dikirim pada *copy* surat order pengiriman. Dokumen ini dikirimkan oleh fungsi pengiriman ke fungsi penagihan sebagai bukti telah dilaksanakan pengiriman barang sesuai dengan perintah pengiriman barang yang diterbitkan oleh fungsi penjualan, sehingga fungsi penagihan dapat segera melaksanakan pengiriman faktur penjualan sebagai dokumen penagihan piutang.

- 4) Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut.

Harga jual yang berlaku, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan begitu, pengisian informasi ke dalam surat order pengiriman dan faktur penjualan harus didasarkan pada informasi harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan yang ditetapkan oleh direktur pemasaran.

- 5) Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan.

Terjadinya piutang yang menyebabkan aset perusahaan bertambah diakui dan dicatatat berdasarkan dokumen faktur penjualan. Faktur penjualan ini dibuat berdasarkan dokumen *copy* surat order pengiriman.

Pengisian informasi harga satuan dan syarat penjualan ke dalam faktur penjualan harus didasarkan pada harga satuan dan syarat penjualan lain yang telah ditetapkan oleh direktur pemasaran.

- 6) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap.

Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang valid. Kevalidan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Dalam sistem penjualan kredit, pencatatan mutasi piutang harus didasarkan pada dokumen sumber dan dokumen pendukung.

- 7) Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang.

Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Setelah karyawan tersebut memutakhir untuk catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya perubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut. Dengan cara ini maka tanggung jawab atas perubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satu pun perubahan data yang dicatumkan dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan. Pencatatan ke dalam kartu piutang diotorisasi oleh fungsi pencatat piutang dengan cara membubuhkan tanda



ketelitian catatan piutang perusahaan, secara periodik fungsi akuntansi diharuskan membuat pernyataan piutang dan mengirimkannya kepada debitur yang bersangkutan, sehingga pengiriman secara periodik pernyataan piutang ini akan menjamin ketelitian data akuntansi yang dicatat oleh perusahaan.

- 3) Secara periodik diadakan rekonsiliasi kartu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar.

Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Dalam pencatatan piutang, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan piutang adalah faktur penjualan. Data dari dokumen sumber ini dicatat melalui dua jalur yaitu dicatat ke dalam jurnal dan kemudian diringkas ke dalam akun kontrol piutang dalam buku besar, dan dicatat dalam kartu piutang sebagai rincian akun kontrol piutang yang tercantum dalam buku besar. Dengan demikian untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di akun kontrol piutang dalam buku besar, praktik yang sehat mengharuskan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara buku pembantu piutang dengan akun kontrol piutang dalam buku besar.











- 4) Mengisi surat kas bon yang berguna sebagai tanda bukti pembayaran awal untuk armada truk/supir.
  - 5) Memberikan pembayaran awal untuk armada truk/supir.
  - 6) Mengisi SPB (surat pengiriman barang) sesuai dengan informasi yang ada.
  - 7) Menyaksikan dan mengecek proses muat barang dari gudang perusahaan pengguna jasa ke armada truk.
  - 8) Memantau posisi armada truk/supir sampai tujuan.
  - 9) Mengambil surat jalan yang telah ditanda tangani oleh penerima bahwa barang tersebut telah sampai dan melunasi pembayaran armada truk/supir.
- d. Bagian Akuntansi (Nyonya Ria)
- 1) Menyusun laporan keuangan perusahaan.
  - 2) Mencatat kartu piutang dan hutang perusahaan.
  - 3) Membuat invoice tagihan.
  - 4) Mengarsipkan surat-surat perusahaan.
  - 5) Mengotorisasi invoice tagihan.
- e. Bagian Penagihanm (Bapak. Fajri)
- 1) Meengirim invoice tagihan ke perusahaan pengguna jasa ekspedisi.
  - 2) Mecocokkan nominal dan informasi-informasi yang bersangkutan invoice tagihan terhadap tanda terima perusahaan.



























- b. Direktur utama memeriksa status piutang perusahaan (pelanggan) tersebut di buku *delivery* (muatan barang) yang berguna layak atau tidak diberikan otorisasi kredit.
- c. Setelah direktur utama memberikan otorisasi kredit, bagian kerani akan mencari armada truk yang sesuai dengan order pelanggan.
- d. Kerani akan mengisi surat *Delivery Order* sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh pelanggan. Surat DO hanya dikeluarkan dan diotorisasi oleh kerani. Surat ini ada dua lembar, lembar pertama akan dikirim ke pelanggan via fax, dan yang kedua digunakan sebagai arsip (1).
- e. Kemudian kerani akan mengisi Surat Pengiriman Barang (SPB) dan Kas Bon. SPB ada empat lembar dan akan diotorisasi oleh kerani dan telah di tanda tangani oleh supir. Lembar pertama (2) ditujukan ke armada truk sebagai surat jalan dari CV. Jaya Langgeng dan tanda bahwa supir armada truk boleh memuat barang pelanggan, lembar kedua (3) ditujukan kepada bagian akuntansi sebagai pendukung pada saat penagihan, lembar ketiga (4) ditujukan kepada supir armada truk untuk pendukung surat kas bon, lembar keempat (5) ditujukan kepada bagian akuntansi sebagai laporan setiap kali ada muatan.
- f. Kas Bon dibuat sesuai dengan informasi yang telah ada. Kas Bon terdiri dari dua lembar dan harus ditandatangani oleh supir armada truk. Lembar pertama (6) ditujukan ke supir armada truk dan

- disertai dengan uang muka pembayaran awal, dan lembar kedua (7) ditujukan kepada bagian akuntansi untuk diarsipkan.
- g. Bagian akuntansi mencatat di kartu piutang sesuai dengan SPB (5), dan mencatat di kartu hutang sesuai dengan Kas Bon (7) yang ditujukan oleh bagian kerani.
  - h. Kerani membayar pembayaran awal biaya pengiriman ke supir armada truk, memberikan dokumen ke supir armada truk yang berisikan SPB (2), Kas Bon (6), dan Surat Jalan Pelanggan (8) yang diberikan kepada kerani saat supir armada truk sampai ditempat pemuatan barang.
  - i. Kerani akan menyaksikan saat proses pemindahan barang muatan dari pelanggan ke truk. Menghitung dan mengecek barang yang akan dimuat sesuai dengan surat jalan dari pelanggan (8).
  - j. Pemantauan armada truk dan menanyakan lokasi setiap waktu kepada armada truk sehingga kerani mengetahui dimana dan kapan armada truk sampai tujuan. Pemantauan tetap dilaksanakan sampai supir armada truk bongkar muatan ke penerima. Surat Pengiriman Barang dan Surat Jalan dari pelanggan harus ditanda tangan dan di stempel.
  - k. Setelah barang muatan sampai ditujuan, maka kerani akan mengambil surat pengiriman barang (2) dan surat jalan dari pelanggan (8), dan juga melunasi sisa pembayaran armada truk.
  - l. Kemudian kerani menyerahkan dokumen SPB (2) dan Surat Jalan Pelanggan (8) kepada bagian akuntansi.











PT. MITRA MULIA MAKMUR	JLT 1805-0874 (Rp. 9.600.000)	1,600,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0880 (Rp. 32.121.000)	20,000,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0872 (Rp. 28.196.000)	2,116,000
PT. PANGAN LESTARI	JLT 1805-0877 (Rp. 4.000.000)	4,000,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0880 (Rp. 32.121.000)	5,185,500
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0880 (Rp. 32.121.000)	5,185,500
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	3,420,000
PT. MITRA MULIA MAKMUR	JLT 1805-0874 (Rp. 9.600.000)	1,600,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0880 (Rp. 32.121.000)	1,750,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	15,260,000
PT. PANGAN LESTARI	JLT 1806-0885 (Rp. 8.000.000)	4,000,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	3,900,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	3,500,000
PT. MITRA MULIA MAKMUR	JLT 1806-0901 (Rp. 7.700.000)	1,600,000
PT. MITRA MULIA MAKMUR	JLT 1806-0883 (Rp. 9.300.000)	1,600,000
PT. JAWA PLASINDO	JLT 1806-0894 (Rp. 14.000.000)	7,000,000
PT. PANGAN LESTARI	JLT 1806-0885 (Rp. 8.000.000)	4,000,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	13,000,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	3,325,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	3,420,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1806-0888 (Rp. 46.474.000)	5,185,500
PT. MITRA MULIA MAKMUR	JLT 1806-0883 (Rp. 9.300.000)	1,600,000
PT. PANGAN LESTARI	JLT 1806-0886 (Rp. 4.000.000)	4,000,000
PT. PANGAN LESTARI	JLT 1806-0887 (Rp. 2.600.000)	2,600,000
PT. MITRA MULIA MAKMUR	JLT 1806-0883 (Rp. 9.300.000)	1,600,000
PT. RUTAN	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	9,000,000
PT. RUTAN	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	9,000,000
PT. RUTAN	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	9,000,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1806-0888 (Rp. 46.474.000)	14,260,000
PT. RUTAN	JLT 1805-0882 (Rp. 36.000.000)	9,000,000
PT. JAWA PLASINDO	JLT 1806-0894 (Rp. 14.000.000)	7,000,000
PT. RUTAN	JLT 1806-0884 (Rp. 18.000.000)	9,000,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1806-0888 (Rp. 46.474.000)	1,426,000
PT. PANGAN LESTARI	JLT 1807-0897 (Rp. 2.600.000)	2,600,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1806-0888 (Rp. 46.474.000)	3,457,000
PT. RUTAN	JLT 1806-0884 (Rp. 18.000.000)	9,000,000
PT. PANGAN LESTARI	JLT 1806-0890 (Rp. 4.000.000)	4,000,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1806-0888 (Rp. 46.474.000)	14,260,000
PT. MATAHARI PUTRA MAKMUR	JLT 1806-0888 (Rp. 46.474.000)	5,185,500

















































- 4) Kas Bon dibuat sesuai dengan informasi yang telah ada. Kas Bon terdiri dari dua lembar dan harus di tanda tangani oleh supir armada truk. Lembar pertama (1) ditujukan ke supir armada truk dan disertai dengan uang muka pembayaran awal, dan lembar kedua (2) ditujukan kepada bagian akuntansi untuk diarsipkan.
- 5) Bagian kerani akan membayar pembayaran awal sesuai dengan harga pokok penetapan armada truk. Sebagai bukti armada truk menerima pembayaran surat kas bon lembar ke dua harus ditanda tangani oleh supir armada truk.
- 6) Pada saat armada truk memuat barang pelanggan, bagian kerani akan memantau proses tersebut sehingga tidak akan terjadi kesalahan yang fatal.
- 7) Surat Jalan Pelanggan yang diberikan ke Bagian Kerani, disatukan dalam dokumen yang berisi Surat Pengiriman Barang (SPB), dan surat kas bon.
- 8) Pemantauan selama proses pengiriman yang dilakukan bagian kerani harus secara detail, dan menginformasikan kepada direktur utama bila barang telah diterima.
- 9) Surat Jalan Pelanggan, dan Surat Pengiriman Barang (SPB) yang telah ditanda tangani oleh penerima barang akan diserahkan ke bagian Kerani.
- 10) Dengan bukti tersebut, Bagian Kerani akan melunasi pembayaran armada supir truk.

























- 2) Secara Periodik Fungsi Akuntansi Mengirim Pernyataan Piutang kepada Setiap Debitur untuk Menguji Catatan Piutang yang Diselenggarakan oleh Fungsi Tersebut

Dalam penjualan kredit di CV. Jaya Langgeng Trans, bagian akuntansi tidak pernah mengecek catatan piutang dengan mengirimkan catatan piutang dan membuat pernyataan kepada debitur. Sehingga, catatan piutang perusahaan tidak bisa menjamin ketelitian data akuntansi.

Berdasarkan teori yang ada, seharusnya bagian akuntansi mengirimkan saldo piutang kepada debitur dan membuat pernyataan apakah sesuai dengan catatan piutang perusahaan. Sehingga, catatan piutang perusahaan dapat dipercaya dan menjamin ketelitiannya.

- 3) Secara Periodik Diadakan Rekonsiliasi Kartu Piutang dengan Akun Kontrol Piutang dalam Buku Besar

Dalam CV. Jaya Langgeng Trans, yang memegang kartu piutang dan buku besar adalah bagian akuntansi. Namun, untuk pencocokkan kedua data tersebut biasanya direktur utama menggunakan Buku *Delivery* (buku pembantu) yang berguna untuk membantu dalam pencocokkan data yang dimiliki bagian akuntansi dan direktur utama sehingga dapat mengotrol data piutang yang ada di bagian akuntansi.



pelanggan yang dilakukan oleh bagian penagihan terhadap jatuh tempo piutang, sedangkan bagian akuntansi telah mencatat ke dalam catatan akuntansi sesuai dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung secara lengkap, penetapan otorisasi bagian penagihan tidak berjalan maksimal, tidak adanya pelatihan secara berkala, sedangkan pemantauan yang dilakukan bagian kerani telah efektif terhadap pemantau pihak pengiriman barang eksternal, tidak adanya pengiriman pernyataan piutang kepada pelanggan, dan fungsi akuntansi dan fungsi kas menjadi satu bagian, dan bagian akuntansi telah merekonsiliasi kartu piutang dengan buku pembantu yang dimiliki oleh direktur utama.

### **3. Saran**

Saran yang dapat diberikan kepada CV. Jaya Langgeng Trans Sidoarjo untuk mengatasi pengendalian dan sistem dalam fungsi penjualan kredit yang belum memadai adalah :

1. Membatasi perangkapan tugas direktur utama yang merangkap bagian kredit dan bagian penjualan sehingga fungsi dan tugas direktur utama tidak berjalan sesuai fungsinya.
2. Perusahaan perlu membuat pernyataan piutang pelanggan dan mengirimkan pernyataan tersebut ke pelanggan.
3. Perusahaan perlu membatasi bagian akuntansi terhadap fungsi kas sehingga perusahaan dapat mencegah terjadi penyelewengan ataupun kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.





- Martinus J.K dan Betri, Analisis Penerapan Sitem Informasi Akuntansi Jasa Ekspedisi di Perusahaan PT. Auto Prima,(Jurnal-STIE MDP, 2010)
- Muharto dkk, *Metode Penelitian Sistem Informasi*, Yogyakarta: Deepublish. 2016
- Mulyadi dan Kanaka, *Auditing (edisi ke-5, cetakan ke-1)*, Jakarta : Salemba Empat. 1998
- Mulyadi dan Puradireja, *Auditing (Cetakan ke-1, Edisi ke-5)*, Jakarta : Salemba Empat, 1998
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi 3*. Yogyakarta : STIE YKPN. 2001
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*, Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Mulyadi, *Auditing Edisi 6*. Jakarta; Salemba Empat. 2002
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi (Edisi ke-4)*. Jakarta : Salemba Empat, 2016
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penellitian Kualitatif* Jakarta: Remaja Rosdakarya, cet xxvi, 2009.
- Ningsih, Suartih, Analisis Pengendalian Intern Pengiriman Barang PT. Eka Sari Lorena Express Cabang Palembang,(Jurnal-Politeknik Palchomtech Palembang, 2013)
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta:Grasindo. 2007
- Sunarto, *Auditing Edisi1*, Yogyakarta : Pena Persadadan Mahenoko Total Design, 2003
- Septiyamin, Ayu, Sistem Informasi Pengiriman Barang dan Dokumen Agen TIKI Parung Serab A.170, (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013)
- Sujarweni, Wiratna, *Sistem Akuntansi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta. 2015
- Widjaja, IG Rai, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc. 2005.

